

SINERGITAS DALAM PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Oleh

Andi Sopandi

Dosen Program Studi Sastra Inggris

Fakultas Komunikasi, Sastra dan Bahasa Universitas Islam "45" Bekasi

Abstract

Poverty reduction synergy is a tactical step in reducing the poverty rate, especially in Indonesia. The main prerequisites are (1) how to explore the potential of community in the form of social capital (Social Capital), (2) Building Self-Reliance; (3) Creating Self-Supporting and (4) Sustainable Program . The four elements above are the basic keys in efforts to tackle poverty.

Keywords: *Community Development, Sustainable Program, Program Synergy*

PENDAHULUAN

Apabila dilihat dari undang-undang dan kebijakan yang telah dibuat pemerintah, telah dirancang payung hukum yang memberikan akselerasi untuk melakukan upaya sinergitas pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Indonesia, di antaranya adalah (a) UU No 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial; (b) Perpres No. 5 tahun 2010 tentang RPJMN 2010 – 2014; (c) Inpres 3 tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan, meliputi: Program Pro Rakyat, Keadilan Untuk Semua (*justice for all*), Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals - MDGs): dan Surat Edaran Sesmenko Kesra tentang Pembagian Tugas Koordinasi Untuk Mengakomodasi Inpres 3/2010. Perencanaan dan penganggaran

serta pelaksanaan kegiatan yang memihak orang miskin (*pro-poor*) adalah kegiatan-kegiatan pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan mengenai sasaran dan cara-cara yang akan dilaksanakan di masa depan dan proses penyusunan rencana keuangan guna mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu penanggulangan kemiskinan, serta pemantauan dan penilaian atas perkembangan hasil pelaksanaannya, yang akan dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan.

Kegiatan tersebut tidak terlepas dari upaya pencapaian *Millennium Development Goals (MDG's)* atau Tujuan-tujuan Pembangunan Milenium. Untuk mencapai tujuan tersebut memiliki serangkaian tujuan yang terikat waktu dan terukur. Tujuan-tujuan tersebut telah disepakati oleh 191 negara anggota PBB yang harus dicapai pada 2015, yaitu:

1. Memerangi kemiskinan ekstrim dan kelaparan: mengurangi setengah jumlah manusia yang hidup dengan penghasilan kurang dari satu dolar per hari, mengurangi setengah dari jumlah manusia yang menderita kelaparan.
2. Mencapai pendidikan dasar yang universal: memastikan agar semua anak laki-laki dan perempuan menyelesaikan tingkat pendidikan dasar.
3. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan: menghilangkan perbedaan gender pada tingkat pendidikan dasar dan menengah, bila mungkin pada 2005, dan pada semua tingkat pendidikan pada 2015.
4. Menurunkan angka kematian anak: mengurangi dengan dua pertiga, angka kematian pada anak-anak balita.

5. Meningkatkan kesehatan ibu: mengurangi dengan tiga perempat, angka kematian ibu-ibu hamil.
6. Memberantas HIV/AIDS, malaria dan penyakit lain: menghentikan dan mulai membalikkan laju penyebaran HIV/AIDS, dan menghentikan dan mulai membalikkan penyebaran malaria dan penyakit-penyakit utama lainnya.
7. Menjamin pelestarian lingkungan: (i) memasukkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program negara, membalikkan arus hilangnya sumber daya alam; (ii) mengurangi sampai dengan setengah dari jumlah orang yang tidak dapat menikmati air minum yang bersih; (iii) meningkatkan taraf hidup dari setidaknya 100 juta orang yang tinggal di tempat-tempat kumuh pada 2020.
8. Membangun kemitraan global untuk pembangunan: (i) mengembangkan lebih lanjut sistem perdagangan terbuka dan sistem finansial yang rule-based, teratur dan tidak diskriminatif. Termasuk di sini komitmen untuk melaksanakan tata pemerintahan yang baik secara nasional maupun secara internasional; (ii) menangani kebutuhan-kebutuhan khas dari negara-negara yang kurang berkembang. Termasuk akses yang bebas tarif dan bebas kuota untuk ekspor-eksport mereka; keringanan pembayaran hutang untuk negara-

PEMBAHASAN

Strategi Penanganan Kemiskinan

Berbagai program tersebut telah memberikan hasil positif tidak hanya pada masyarakat, tetapi juga pada pemda dan lembaga-lembaga yang ada di tingkat desa maupun kabupaten, misalnya program IDT: (1) menumbuhkan kesadaran publik adanya kemiskinan di lingkungannya yang harus diatasi; (2) perangkat pemerintah desa dan tokoh masyarakat memperoleh peluang belajar mengelola sendiri program penanggulangan kemiskinan, salah satunya menemukanli warganya yang tergolong miskin; (3) dengan program ini telah memperkuat peran LKMD dan LMD sebagai bentuk penguatan kelembagaan desa; (4) penduduk miskin memiliki peluang belajar berkelompok dan mengelola usaha ekonomi produktif; (5) banyak kasus terjadinya perubahan kondisi ekonomi keluarga miskin menjadi tidak miskin.

Dengan program penangan Kemiskinan, tercatat beberapa keberhasilan antara lain: (1) menguatnya peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai bentuk penguatan kelembagaan Kelurahan/desa; (2) masyarakat mulai mengenal kompetisi; (3) masyarakat memiliki peluang untuk mengemukakan aspirasinya serta peluang turut mengambil keputusan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pertanggungjawaban; (4) masyarakat menjadi terbiasa melalui serangkaian proses diskusi dan musyawarah dalam merencanakan suatu kegiatan pembangunan; (5) masyarakat mulai mengenal prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif dan demokratis dalam mengelola kegiatan-kegiatan publik.

Strategi penanggulangan kemiskinan selain diupayakan oleh pemerintah pusat juga diupayakan oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. Perkembangan lingkungan strategis yang senantiasa berubah dari waktu ke waktu. Dengan adanya krisis ekonomi dan proses transisi dari sistem pemerintahan dari yang bersifat sentralistik ke arah otonomi daerah, maka pemda menghadapi tantangan baru untuk menggerakkan pembangunan maupun menanggulangi kemiskinan.

Oleh sebab itu, langkah strategis yang harus dilakukan harus dilakukan secara bertahap, yaitu:

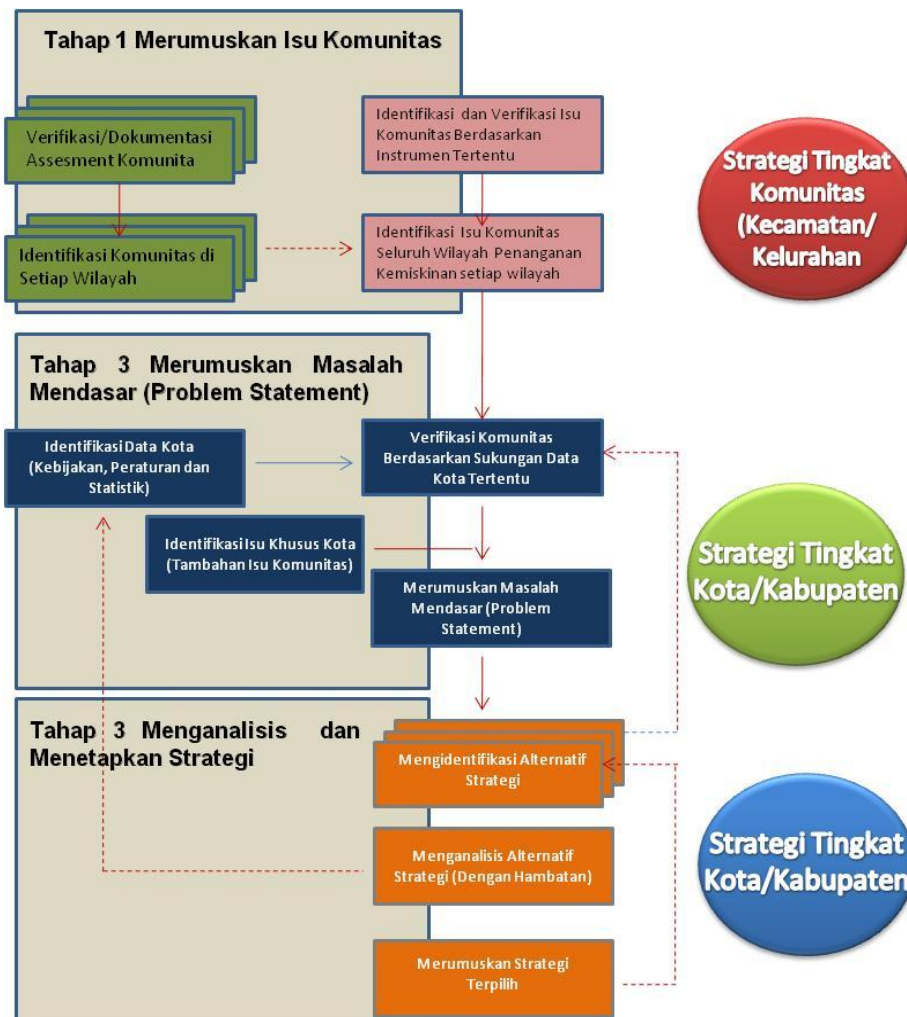
1. Mengidentifikasi isu komunitas (baik tingkat Kota/Kecamatan/ Kelurahan/Masyarakat)
2. Merumuskan Masalah yang Mendasar
3. Kemampuan Menganalisis dan Menetapkan Strategi Penanggulangan Kemiskinan, baik di tingkat Kota, Kecamatan maupun kelurahan

Ketiga hal tersebut harus dilakukan secara sinergis dalam upaya penanganan kemiskinan di masyarakat, optimalisasi sinergitas kebijakan penanggulangan kemiskinan, meliputi:

- (1) Integrasi program-program penanggulangan kemiskinan pada tahap perencanaan, sinkronisasi program pada tahap pelaksanaan, dan sinergi antar pelaku (pemerintah, dunia usaha, masyarakat madani) perlu dioptimal lagi;
- (2) Pendataan, pendanaan dan kelembagaan penanggulangan kemiskinan perlu dioptimalkan lagi;
- (3) Koordinasi antar program-program penanggulangan kemiskinan antara instansi pemerintah pusat dan daerah perlu di optimalkan lagi;
- (4) Kemitraan dan kerjasama antara kelembagaan di pemerintah, dunia usaha, LSM, dan masyarakat madani dalam bermitra dan bekerjasama dalam penanggulangan kemiskinan belum optimal

Peran pemerintah daerah dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja, adalah dengan Meningkatkan Peran Pemerintahan Daerah untuk berpihak pada penanggulangan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi (*pro-poor, pro-jobs, dan pro-growth*), melalui ; Kebijakan daerah dalam penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja melalui penetapan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD); alokasi APBD yang berpihak pada masyarakat miskin dengan meningkatkan porsi anggaran untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin dan kegiatan padat karya bagi masyarakat miskin; Meningkatkan akses bagi masyarakat miskin khususnya kaum perempuan terhadap sumber daya kapital; dana bergulir dan kredit mikro; Membentuk dan atau memperkuat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TLPK) Provinsi dan atau Kabupaten/Kota sesuai Perpres Nomor 54 Tahun 2005 dan Keputusan Mendagri Tentang Pembentukan TLPKD berdasarkan SE Mendagri No.412.6/3186/SJ.

Gambar 1.
Kerangka Kerja Strategi Penanggulangan Kemiskinan
Melalui Pemberdayaan Masyarakat



Sinergitas Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan

Saat ini pemerintah sedang merumuskan dan menyusun Strategi Penanggulangan Kemiskinan Nasional. Dalam rangka pengarusutamaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, maka pemerintah menyiapkan pedoman dan petunjuk bagi instansi sektoral dan daerah untuk menyusun program dan rencana anggaran pembangunan yang berpihak pada upaya penanggulangan kemiskinan serta memberikan bantuan teknis kepada instansi sektoral dan daerah untuk melaksanakan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan secara terdesentralisasi.

Berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan di daerah dan adanya umpan balik (*feedback*) terhadap strategi jangka panjang yang dirumuskan pemerintah dalam upaya penanggulangan kemiskinan, maka daerah-daerah. Berbagai masukan yang terkait dengan pelaksanaan strategi penanggulangan kemiskinan. Masukan-masukan ini menyangkut aspek sinergitas, seperti aspek kelembagaan, kebijakan dan penganggaran program, ketersediaan sumber daya manusia, penyediaan data dan informasi, serta monev. Selain itu, juga ada masukan mengenai peran pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga-lembaga donor, dan lembaga swadaya masyarakat dalam memberikan dorongan atau *support* untuk melakukan sinergitas strategi penanggulangan kemiskinan di daerah.

Sinergitas strategi penanggulangan kemiskinan selama ini telah dirumuskan menjadi lima kategori, yaitu: (1) Aspek kelembagaan penanggulangan kemiskinan; (2) Kebijakan dan penganggaran program untuk penanggulangan kemiskinan; (3) Sumber daya manusia (4) Data dan informasi mengenai kemiskinan, dan (5) Sistem monitoring dan evaluasi (monev) terhadap kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan

Alternatif pemecahan terhadap kelima masalah tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Aspek Koordinasi kelembagaan penanggulangan kemiskinan

Pada aspek kelembagaan diperlukan lembaga seperti Lembaga Penanggulangan Kemiskinan (LPK) yang kuat, melalui penguatan kapasitas LPK, keanggotaan LPK yang multi-stakeholders, adanya legalitas LPK yang berkelanjutan dengan tugas-tugas yang secara jelas dirumuskan dalam suatu peraturan daerah (perda), dan penguatan kapasitas bagi masyarakat dan lembaga masyarakat, baik yang sifatnya formal maupun nonformal. Lembaga LPK yang kuat ini harus berkoordinasi secara langsung dengan kepala daerah. Pihak-pihak yang berperan dalam menguatkan kelembagaan LPK ini adalah Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Walikota, serta lembaga-lembaga donor.

2. Kebijakan dan penganggaran program untuk penanggulangan kemiskinan untuk memecahkan masalah pada aspek kebijakan dan penganggaran program diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah, DPRD, maupun masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan. Komitmen tersebut harus secara eksplisit dituangkan dalam kebijakan dan penganggaran program. Misalnya memasukkan Strategi Penanggulangan Kemiskinan (SPK) ke dalam Rencana Strategis Daerah (Renstrada). Hal ini perlu didukung dengan penerapan good governance dan penciptaan lapangan kerja dan usaha, serta adanya akses pelayanan publik. Hal ini bisa dilakukan dengan merumuskan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus memihak kepada rakyat miskin. Selain itu, diperlukan Perda yang secara nyata mengalokasikan anggaran APBD untuk program penanggulangan kemiskinan. Hal ini juga harus didukung perda tentang investasi yang berpihak kepada rakyat miskin (pro-poor investment) dan adanya perda yang mengatur tentang perimbangan keuangan antara kabupaten/kota dan desa. Pemda paling tidak harus memiliki Standar Pelayanan Minimal bagi masyarakatnya dalam penyediaan fasilitas dasar di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, maka masyarakat harus diberi akses yang memadai pada modal dan pasar.

Untuk mewujudkan hal tersebut di atas diperlukan sinergi antara eksekutif maupun legislatif, BUMN/BUMD, sektor swasta, dan dinas terkait di daerah. Peranan Bappenas dan Departemen Keuangan, serta pihak perbankan di tingkat pusat juga sangat menentukan, selain keterlibatan masyarakat itu sendiri dalam penanggulangan kemiskinan.

3. Sumber daya manusia

Untuk mengatasi masalah sumber daya manusia yang ditemui selama ini tentunya perlu dilakukan upaya peningkatan mutu sumber daya manusia, termasuk peningkatan mutu masyarakat miskin itu sendiri. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, memiliki peranan yang penting dalam peningkatan mutu sumber daya manusia ini. Hal ini bisa pula dilakukan dengan dukungan dari lembaga-lembaga donor maupun lembaga swadaya masyarakat yang bisa memberikan bantuan teknis (technical assistance) maupun pemberian dana hibah (grant). Untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia perlu dilakukan peningkatan knowledge, attitude, and skill baik bagi forum multipihak maupun masyarakat.

4. Data dan informasi mengenai kemiskinan

Permasalahan di bidang data dan informasi dapat diatasi dengan penyamaan persepsi, baik mengenai definisi/pengertian, indikator maupun profil kemiskinan. Kesamaan persepsi mengenai kemiskinan ini dapat dilakukan dengan melakukan analisis kemiskinan

partisipatif, menggunakan Susenas sebagai data pembanding terhadap data dari Badan Pusat Statistik (BPS), dan bisa juga dilakukan dengan survei atau pendataan secara langsung terhadap masyarakat miskin. Peranan LPK dan BPS dalam hal ini sangat menentukan dalam penyediaan data dan informasi yang akan digunakan dalam menyusun kebijakan penanggulangan kemiskinan.

5. Monitoring dan Evaluasi

Dalam pemantauan dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan tidak hanya diperlukan monev yang sifatnya internal program atau proyek, tetapi juga perlu monev eksternal dan independen. Oleh karena itu, diperlukan adanya standar kinerja atau indikator yang dipakai sebagai dasar untuk melakukan monev. Selain itu, sistem dan mekanisme monev harus partisipatif, dan diperlukan kaji ulang (review) terhadap kebijakan-kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan di daerah. Suatu program atau proyek juga harus ada mekanisme penyelesaian konflik (conflict resolution) apabila dalam pelaksanaannya ditemui suatu permasalahan.

Untuk itu, dapat dilakukan monev secara internal, eksternal, maupun independen. Selain itu bisa juga dilakukan kajian-kajian terhadap kebijakan dan program. Sebagai hasil dari suatu monev diperlukan adanya penghargaan (reward) atau sanksi (punishment). Untuk menjalankan fungsi monev ini, peranan berbagai lembaga sangat penting. Lembaga-lembaga tersebut adalah LPK, Badan Pengawas Daerah (Bawasda), perguruan tinggi, kelompok pemantau independen, Unit Pengaduan Masyarakat (UPM), masyarakat pada umumnya, dan lembaga-lembaga donor.

SIMPULAN

Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Pada dasarnya tidak hanya sebatas pada perumusan strategi. Akan tetapi, bagaimana kemampuan mengidentifikasi mulai dari karakteristik, kebutuhan dan permasalahan di tingkat komunitas (Masyarakat, Tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan) secara komprehensif.

Selanjutnya, optimalisasi rumusan masalah mendasar di tingkat kota/kabupaten hingga provinsi, sehingga secara integral dapat menganalisis dan menetapkan strategi penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi.

Kesemuanya perlu didukung dengan kebijakan yang berpihak kepada pola pemberdayaan masyarakat dan fokus serta kepedulian seluruh stakeholder dalam hal ini pemerintah, dunia usaha dan Industri (melalui *Corporate Social Responsibility*), Lembaga Swadaya masyarakat, tokoh masyarakat (Tomas), Tokoh Agama (Toga) dan perguruan tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto. 2001. *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas; Pengantar pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis*. Jakarta: FE-UI.
- Adimihardja, Kusnaka dan Harry Hikmat. 2001. *PRA (Participatory Research Appraisal) dalam Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Collien, William. 1996. *Pendekatan Baru dalam Pembangunan Pedesaan di Jawa*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Craib, Ian. 1992. *Teori-Teori Sosial Modern; Dari Parsons Sampai Habermas*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Ediyono, Setijati H. 1999. *Prinsip-Prinsip Lingkungan dalam Pembangunan yang Berkelanjutan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Ife, Jim. 1995. *Community Development; Creating Community Alternatives-Vision, Analysis and Practice*". Australia: Longman.
- Kartasasmita, Ginanjar. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat; Memadukan Pertumbuhan dan pemerataan*. Jakarta: Pustaka Cidesindo.
- Korten, David C. 1993. *Menuju Abad ke-21: Tindakan Sukarela dan Agenda Global Forum Pembangunan Berpusat-Rakyat*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan Pustaka Sunar Harapan.
- _____.1992. *Management Community; Asian Experience and Perspectives*. Kumarian Press.
- Sobary, Mohamad.1995. *Kesalehan dan Tingkah Laku Ekonomi*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.
- Suhandoyo. 2002. *"Pengembangan Wilayah Pedesaan dan Kawasan Tertentu: Sebuah Kajian Eksploratif"*. Jakarta: Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).
- Yuwono S, Arief M, Simanjuntak PJ dan Sagir S. 1985. *Produktifitas dan Tenaga Kerja Indonesia*. Jakarta: Lembaga Sarana Informasi Usaha dan Produktifitas